



### Polda Sumut Ciduk Wanita Promosikan Situs Judi Online

Medan, MIMBAR - Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menindaklanjuti instruksi Presiden dan Kapolri tentang penindakan dan pemberantasan maraknya judi online (judol). Hasilnya, Tim Direktorat (Dit) Siber Polda Sumut yang melakukan

patroli siber di dunia maya menangkap seorang pelaku berinisial HM, wanita warga Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, yang terlibat tindak pidana judi online.

■ Bersambung ke Hal 7



### Cara Islam Menumpas Mafia Peradilan

Surabaya, MIMBAR - Beberapa hari lalu Kejaksaan Agung melakukan OTT (operasi tangkap tangan) terhadap tiga hakim PN Surabaya. Ketiganya terjerat kasus suap vonis bebas tersangka penghilangan nyawa Dini Sera Afriyanti, Gregorius Ronald Tannur.

■ Bersambung ke Hal 7

## JELANG PILKADA SERENTAK, MUHAMMADIYAH:

# Haramkan Politik Uang

**PRABOWO JANJI TAK INTERVENSI PILKADA SERENTAK**

## Kader PDIP Tidak Ragu Bergerak Pemerintah Bersih

Jakarta, MIMBAR - Presiden Prabowo Subianto bertekad memimpin pemerintahan yang bersih dan meminta jika ada yang tak setuju dengannya silakan keluar. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN). Dia menegaskan, tak ada negara yang berhasil tanpa pemerintahan yang bersih.

“Oleh karena itu, saya bertekad memimpin pemerintahan RI yang bersih.”

■ Bersambung ke Hal 7

Jakarta, MIMBAR - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram penerimaan politik uang dalam kontestasi pilkada serentak 2024.

Politik uang dalam bentuk suap, sogokan, dan imbalan untuk transaksi jual-beli suara dinilai merusak integritas demokrasi dan mendorong korupsi.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muquoddas melalui keterangan tertulis yang dinukil dari Kompas, Ahad (3/11/2024), mengatakan, fatwa haram politik uang (risywah politik) itu dikeluarkan dengan memperhatikan hasil sidang Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Praktik politik uang itu dilarang secara hukum maupun agama karena menengarui pilihan pemilih dengan materi.

■ Bersambung ke Hal 7



### PRABOWO JANJI TAK INTERVENSI PILKADA SERENTAK

## Kader PDIP Tidak Ragu Bergerak

Jakarta, MIMBAR - Presiden Prabowo Subianto telah berjanji dan memastikan untuk tidak akan mengintervensi Pilkada Serentak 2024.

Berkeinginan dengan itu, Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy memerintahkan kadernya untuk tak ragu-ragu melawan oknum aparat yang melakukan intimidasi dalam pilkada, karena itu tak sejalan dengan sikap presiden sebagai panglima tertinggi.

Ronny menuturkan, sikap Prabowo Subianto itu direspons baik oleh PDIP dengan sebuah sikap optimisme bahwa pelaksanaan pilkada serentak bisa berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, kader dan simpatisan PDIP di seluruh Indonesia untuk terus bergerak dan tidak takut. Kader tak boleh takut melawan jika ada upaya intervensi oleh oknum aparat.

■ Bersambung ke Hal 7



## Bus Rombongan Sekolah Terbalik

### 1 TEWAS, 3 LUKA-LUKA

Diborongborong, MIMBAR -- Bus yang mengangkut anak sekolah terbalik di Jalan Umum KM 07 - 08 Sipahutar - Siborong-borong, tepatnya di Dusun Adaran Desa Bahal Batu I, Siborong-borong, Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara (Sumut) pada Sabtu (2/11).

Kapolres Taput AKBP Emis Sitinjak melalui Kasi Humas Aiptu W Baringbing mengatakan kecelakaan itu menyebabkan satu penumpang meninggal dunia dan tiga orang mengalami luka-luka.

“Atas peristiwa tersebut ada empat orang korban dan satu orang di antaranya meninggal dunia dan tiga orang luka-luka yang keseluruhannya anak sekolah,” kata Aiptu W. Baringbing. Adapun korban yang luka-luka yaitu Marvel Panjaitan (17) warga Desa Onan Runggu II, Kecamatan Sipahutar, Taput; Viwyn Aliceia Sihombing (8) warga Desa Bahal Batu I, Kecamatan Siborongborong, Taput; dan Junior

■ Bersambung ke Hal 7

### Carut-marut Proyek Pasar Tavip Bernilai Rp 76 M

## Kejatisu Perlu Segera Periksa PPK dan Kontraktor

WALAU sudah diberi perpanjangan waktu selama 60 hari (dua bulan) hingga berakhir pada 10 November mendatang, tetapi proyek pembangunan Pasar Tavip Binjai masih amburadul. Selain tidak tepat waktu, juga masih banyak item sebagaimana tercantum dalam kontrak belum dikerjakan.

Karenanya wajar bila proyek yang bernilai Rp 76 miliar lebih ini disinyalir berpotensi merugikan keuangan negara yang cukup besar. Untuk itu Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diminta perlu segera melaku-



kan pemeriksaan kepada PPK dan kontraktor PT.KBMP dan pihak terkait lainnya atas dugaan permasalahan yang terjadi.

Informasi yang diterima Mimbar Umum, Jumat (1/11), mengungkapkan, pada papan proyek tercantum bahwa proyek Pasar Tavip Binjai dananya bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023/2024 dengan pagu Rp 76.637.278.000 (Rp

76 miliar lebih). Tercatat masa pengerjaan selama 330 hari. Namun tidak jelas kapan dimulai dan kapan tanggal selesainya proyek kebanggaan warga Binjai itu selesai.

Dirjen Cipta Karya ketika dijabat Diana Kusumastusi (sebelum diangkat menjadi Wakil Menteri PU) saat berkunjung ke

■ Bersambung ke Hal 7

### Jadwal Salat

2 JUMADIL AWAL 1446 H

Subuh : 04:52 WIB	Maghrib : 18:11 WIB
Zuhur : 12:12 WIB	Isha : 19:22 WIB
Ashar : 15:32 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya

### Hidayah

## Janji Sembako Murah

Oleh Dr A Rasyid, MA (Dosen FIS UIINSU)

HARI ini para calon Kepala Daerah cenderung menerbar janji-janji di berbagai tempat mereka berkampanye, bahkan tebar janji juga dipajangkan di balaho-baleho besar di pinggir jalan yang dinilai cukup strategis. Terkadang ada janji-janji yang tidak masuk akal untuk bisa direalisasikan dengan baik ketika kelak mereka menjabat.

■ Bersambung ke Hal 7

## Prabowo

**Dari Halaman 1**

Yang bersama saya ayo, yang tak mau, minggir!" kata Prabowo.

Dia menegaskan pihaknya ingin Indonesia berdiri tegak terhormat karena rakyatnya sejahtera. Prabowo juga mem-

inta semua pihak bekerja keras untuk seluruh rakyat Indonesia.

Acara GSN itu dihadiri oleh Titik Soeharto dan Didit Prabowo. Selain itu, juga dihadiri oleh menteri Kabinet Merah Putih macam AHY, Cak Imin dan Bahlil Lahadalia. (cnni/js)

## Bus Rombon-

**Dari Halaman 1**

Manalu (16) warga Desa Onan Runggu II, Kecamatan Sipahutar, Taput.

"Sedangkan korban meninggal dunia yaitu Friska Juniati Sihombing (17) warga Desa Bahal Batu I, Kecamatan Siborongborong, Taput. Korban meninggal dunia di tempat," jelasnya.

Menurutnya, bus tersebut dikemudikan oleh Hakim Tampubolon (69), warga Desa Onan Runggu II Kecamatan Sipahutar, Taput.

Dari keterangan saksi dan hasil olah TKP (tempat kejadian perkara), bus tersebut melaju dari arah Sipahutar menuju Siborong-borong dengan membawa penumpang anak sekolah sebanyak 28 orang."Tepat di

tempat kejadian, bus selisih jalan dengan mobil colt diesel jenis dump truck. Sopirnya meminggir ke beram (tepi) jalan. Tanpa di sadari pengemudi bus, beram (tepi) jalan sebelah kiri longsor tidak sanggup menahan busnya sehingga bus tersebut terbalik," urainya.

Akibatnya penumpang yang di dalam saling terlempar. Sedangkan korban meninggal dunia diduga terjepit di pintu bus dan meninggal dunia di tempat "Untuk penumpang lain sebanyak 24 orang lagi tidak mengalami luka-luka dan sudah kembali kepada keluarganya. Untuk tiga orang luka pun sudah pulang dari Rumah Sakit Santa Lucia Siborong-borong karena hanya luka ringan," terangnya

Saat ini, sopir dan mobil su-

## Polda Sumut ...

**Dari Halaman 1**

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan, pelaku HM ditangkap karena mempromosikan atau meng-endorse situs judi online melalui media sosial Instagram.

"Ada lima situs judi online diantara WOKA SLOT, PIXUE BET, DRAG SLOT, BYON88, KYOTO98 yang dipromosikan pelaku," katanya, Sabtu (2/10).

Hadi menerangkan, pelaku dicat oleh akun Instagram dengan username Galihhrakasiwi dan beberapa akun palsu lainnya untuk memposting di story Instagram setiap harinya dengan konten dan link/URL perjudian online.

"Dalam praktik perjudiannya online pelaku mendapat

imbangan atau gaji sebesar Rp650.000-Rp1.000.000 per bulannya," terangnya terhadap pelaku sudah ditshand di Direktorat (Dit) Siber Polda Sumut.

"Atas perbuatannya dikenakan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Subs Pasal 303 ayat (1) huruf a KUH-Pidana tentang tindak pidana Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian," pungkasnya.(A-10)



## Hidayah Janji Sembako..

**Dari Halaman 1**

Janji kampanye tidak rasional atau sulit teralisasi sesungguhnya bisa mencederai kualitas demokrasi. Dalam konteks demokrasi yang sehat, kampanye politik seharusnya diwarnai oleh janji-janji dan program yang realistis, berbasis data, dan benar-benar dapat dijalankan untuk kepentingan publik.

Beberapa cara janji tidak rasional bisa berdampak negatif pada demokrasi seperti: Ketika calon mengumbar janji yang sulit diwujudkan, seperti sembako murah tanpa rencana implementasi jelas, hal ini bisa menciptakan harapan palsu di masyarakat. Harapan yang tidak terpenuhi akan membuat masyarakat kecewa dan skeptis terhadap demokrasi. Dalam jangka panjang, kekecewaan ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan institusi pemerintahan.

Janji yang tidak rasional sering kali bersifat populis, bertujuan meraih suara cepat tanpa mempertimbangkan aspek kelayakan atau keberlanjutan program tersebut. Hal ini dapat mengalihkan perhatian pemilih dari hal-hal yang lebih substansial, seperti kompetensi, rekam jejak, dan integritas calon. Akibatnya, pemilih cenderung memilih berdasarkan janji yang tampak menarik, bukan berdasarkan kapabilitas calon untuk memimpin.

Janji material yang sulit dijalankan, seperti sembako murah tanpa sumber anggaran yang jelas, bisa diartikan sebagai bentuk politik transaksional, di mana pemilih "dibeli" dengan iming-iming insentif. Ini mirip dengan praktik politik uang yang mencederai demokrasi, karena pemilih cenderung memilih demi keuntungan jangka pendek, bukan demi perubahan jangka panjang.

Janji-janji yang tidak realistis tentu saja dapat menghambat proses pendidikan politik di masyarakat. Alih-alih mendorong diskusi yang berbobot mengenai visi pembangunan dan solusi atas masalah kota, janji seperti ini mengalihkan perhatian dari program-program penting yang sebenarnya memerlukan perbaikan. Pendidikan politik yang kurang baik akan berdampak pada kualitas pemilih yang tidak kritis dalam menilai janji-janji kampanye.

Calon yang mudah memberikan janji tanpa perhitungan yang jelas mungkin menunjukkan tanda kurangnya komitmen dan tanggung jawab dalam memimpin. Setelah terpilih, mereka mungkin merasa tidak terikat pada janji tersebut, yang pada akhirnya merugikan publik. Demokrasi yang baik memerlukan pemimpin yang bertanggung jawab dan berkomit-

men untuk menepati janji sesuai kapasitasnya.

Agar demokrasi tetap berkualitas, sangat penting bagi calon pemimpin untuk menawarkan program-program yang dapat dijalankan dan memberikan manfaat berkelanjutan. Pemilih juga perlu didorong untuk lebih kritis dan tidak mudah terbuai dengan janji yang tampak menarik tetapi sulit diwujudkan.

Menjajankan sembako murah bisa jadi taktik kampanye yang rasional secara politis, tetapi penting bagi calon tersebut untuk menjelaskan lebih lanjut programnya secara terinci agar publik memahami bahwa itu bukan sekadar janji pemilih. Selain itu, calon perlu menekankan program lain yang berdampak jangka panjang untuk memperbaiki ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Dari perspektif demokrasi dan etika politik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Untuk Janji sembako murah termasuk dalam kategori kebijakan populis yang menarik secara langsung. Meski demikian, perlu diperhatikan apakah janji ini realistis dan memiliki landasan kebijakan yang jelas atau sekadar janji untuk menarik suara. Program sembako murah perlu didukung anggaran, mekanisme distribusi, dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait agar dapat teralisasi.

Menjajankan sembako murah tanpa menjelaskan mekanisme yang jelas atau sumber dananya dapat membuat masyarakat salah memahami proses kebijakan publik. Pemilih bisa terjebak pada iming-iming jangka pendek dan kurang mempertimbangkan aspek kapasitas serta integritas calon dalam mengelola kota secara keseluruhan. Hal ini bisa merusak kualitas demokrasi jika pemilih hanya terpaku pada janji yang mudah namun sulit untuk diterapkan.

Janji sembako murah bisa disalahartikan sebagai politik uang terselubung jika tidak dikelola dengan baik, karena terkesan memberikan insentif ekonomi sebagai imbalan dukungan. Hal ini dapat mencederai esensi demokrasi yang seharusnya berdasarkan pilihan rasional atas kualitas calon, bukan hanya janji material.

Sembako murah dapat menjadi solusi sementara untuk meringankan beban masyarakat, tetapi jika tidak disertai kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, dampaknya akan sangat terbatas. Pemimpin yang baik seharusnya fokus pada upaya memperkuat ekonomi masyarakat secara keseluruhan, seperti membuka lapangan kerja, memberdayakan UMKM, dan mendorong stabilitas harga pangan dalam jangka panjang. \*\*\*

**Dari Halaman 1**

"Momentum pilkada serentak 2024 yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024, Muhammadiyah perlu menegaskan sikap dan imbauan yang mesti diperhatikan oleh seluruh anggota, kader, jemaah secara khusus, dan masyarakat luas secara umum untuk mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kebij-

## Haramkan Politik...

kan publik yang maslahat," tutur Busyro.

PP Muhammadiyah berpedangan, politik uang telah menjadi fenomena sosial, budaya, dan politik yang memiliki implikasi sangat serius terhadap moralitas masyarakat, pragmatisme dalam kehidupan berbangsa, dan rendahnya kualitas demokrasi. Politik uang memiliki daya rusak politik yang menghancurkan alam pikiran masyarakat sehingga muncul pandangan untuk melegalkan politik

uang dalam demokrasi.

Praktik tersebut jelas menjadi ancaman serius bagi demokrasi Indonesia, karena menghilangkan esensi keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat. Normalisasi dan pemaklaman terhadap praktik politik uang yang termasuk di dalamnya transaksi jual-beli suara (vote buying) menjadi penyebab korupsi, penyelewengan kekuasaan, dan peluruhan kedaulatan rakyat.(kps/js)

## Cara Islam...

man, ia pun di neraka. (HR Abu Dawud)

Dengan demikian, asas paling kokoh bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dengan amanah dan adil, adalah iman dan takwa, bukan gaji atau fasilitas

Penghasilan yang besar atau fasilitas yang mewah bisa kalah oleh gratifikasi yang nilainya jauh lebih besar. Tanpa iman dan takwa, hakim juga bisa ditundukkan oleh kekuasaan atau ancaman

Syaikh Taqiuddin an-Nabhani rohimahullooh dalam kitab Nizhoom al-Hukm fi al-Islaaam menyatakan, seorang qodhi (hakim), selain harus memenuhi syarat muslim, baligh, berakal, faqih dan cerdas, ia juga harus punya karakter adil.

Orang adil adalah orang yang tidak fasik alias bukan pelaku kemaksiatan. Bagaimana hukum bisa tegak dari mental para pelaku maksiat?

Para hakim diingatkan bahwa jabatan mereka bukanlah untuk mencari kekayaan, tetapi mengakkan hukum Allah swt.

Jabatan yang mereka miliki justru bisa mengancam dirinya di akhirat kelak.

Sabda Nabi saw: "Man ju'ila qoodhiyan baina n-naas faqod dzubiha bighoiri sikkina" (Siapa saja yang dijadikan hakim di tengah-tengah masyarakat, maka ia telah disembelih tanpa pisau (HR Abu Dawud). Ibnu Sholah berkata, "Maksud disembelih adalah karena seorang hakim berada di antara azab dunia jika dia lurus dan azab akhirat jika dia rusak." (Ibnu Sholah, Fataawaa ibn ash-Sholaah, hlm. 8).

Kedua, para hakim dalam peradilan Islam hanya memberlakukan hukum Islam dalam semua kasus peradilan yang mereka hadapi.

Kekuatan hukum Islam itu pasti, jelas dan dapat dipahami oleh setiap muslim, terutama para fuqoha.

Allah swt berfirman: "Man lam yahkum bi maa anzala l-lloha fa 'ulaaika humu l-kaafiruuna" (Siapa saja yang tidak memutuskan hukum menurut wahyu yang telah Allah turunkan, maka mereka itu adalah kaum kafir - QS al-Maidah [5]: 44)

Sebaliknya, hukum warisan kolonial yang berbasiskan peradilan Romawi mengandung banyak interpretasi, sehingga orang bisa mencari celah untuk lolos dari hukuman.

Ketiga, para hakim, sebagaimana para pejabat dan pegawai dalam Negara Khilafah akan diberikan gaji yang layak untuk memenuhi kehidupan mereka. Mereka berhak atas gaji, rumah, kendaraan bahkan pembantu jika memang dibutuhkan.

Dengan itu peluang untuk menerima gratifikasi dapat dielakkan.

Nabi saw. bersabda: "Siapa yang diserahi tugas untuk mengurus suatu pekerjaan untuk kami, sementara ia tidak memiliki rumah, hendaklah ia mengambil rumah; atau ia belum beristri, hendaklah ia menikah; atau ia tidak memiliki pembantu, hendaklah ia mengambil pembantu; atau ia tidak memiliki kendaraan, hendaklah ia mengambil kendaraan. Siapa saja yang mendapatkan sesuatu selain hal itu, maka itu adalah kecurangan. (HR Ahmad).

Kecempat, vonis hakim dalam satu pengadilan mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya secara mutlak. Tidak ada proses naik banding, kasasi, atau Peninjauan Kasus (PK), remisi, grasi, dsb. Dengan begitu peluang terjadinya suap-menyuap atau mafia peradilan semakin berkurang.

Allah swt berfirman: "Wa maa kaana limu' minin wa laa mu' minatin idzaa qodho l-loohu wa rusuuluuhu amron an yakuuna lahumu l-khoirotu min amrihim" (Tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka (QS al-Ahzab [33]: 36).

Kelima, khalifah akan menjatuhkan sanksi keras bagi aparat penegak hukum seperti polisi, hakim dan

## Kader PDIP...

**Dari Halaman 1**

lokasi Pasar Tavip Binjai pada Selasa (6/2/2024) lalu, sudah mengingatkan sejak awal agar pembangunan proyek Pasar Tavip dikerjakan dengan baik serta tepat waktu.

"Apa yang disampaikan ibu Diana kurang diseriusi pihak PPK, kontraktor dan lainnya. Kuat dugaan telah terjadi persekongkolan dan tidak tepat waktu. Terbukti proyek tersebut gagal diresmikan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Sumut beberapa hari sebelum habis masa periodenya baru-baru ini. Untuk itu, Kejaksaa Tinggi Sumut dan pihak terkait lainnya, seharusnya aktif untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengerjaan Pasar Tavip," ujar sumber.

Sumber juga menguraikan sejumlah kecurangan yang terjadi di proyek Pasar Tavip Binjai tersebut. Di antaranya, Pihak Manajemen Konstruksi (MK) untuk kesekian kalinya menyurati kontraktor PT. KBMP dengan tembusan PPK pada tanggal 21 September 2024, mengingatkan kembali supaya menyelesaikan administrasi karena waktu yang semakin mendekat

setelah masa perpanjangan waktu selama 60 hari (2 bulan) berakhir tanggal 10 November 2024.

"Jika tidak dapat diselesaikan, maka pencairan keuangan 60-70 persen tertunda," tegas pihak MK dalam suratnya yang ditandatangani Bahari Nur ST selaku TA Quantity Engineer.

Kejanggalan lainnya, dalam beberapa kali rapat tim antara pihak MK dan PPK, seperti pada Rabu (23/10/2024) lalu, terungkap bahwa pengujian tanah dan pengujian beton belum dilakukan, sehingga mutu proyek pembangunan Pasar Tavip Binjai benar-benar diragukan.

Selanjutnya, penutup atap yang terpasang bergelombang (tidak rata), pemasangan keramik bermasalah, railing borders tidak mengikuti gambar shoft drawing, kamar mandi dan kondisi air, serta kebersihan masih bermasalah.

Anehnya lagi, proyek yang diduga amburadul tersebut hingga sekarang pihak kontraktor tidak mendatangkan petugas K3. Hingga saat ini pekerja pun tidak menggunakan helm dan rompi pengaman, padahal anggaran untuk K3 pada kontrak cukup lumayan besar.

## Kejatisu Perlu...

**Dari Halaman 1**

lokasi Pasar Tavip Binjai pada Selasa (6/2/2024) lalu, sudah mengingatkan sejak awal agar pembangunan proyek Pasar Tavip dikerjakan dengan baik serta tepat waktu.

"Apa yang disampaikan ibu Diana kurang diseriusi pihak PPK, kontraktor dan lainnya. Kuat dugaan telah terjadi persekongkolan dan tidak tepat waktu. Terbukti proyek tersebut gagal diresmikan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Sumut beberapa hari sebelum habis masa periodenya baru-baru ini. Untuk itu, Kejaksaa Tinggi Sumut dan pihak terkait lainnya, seharusnya aktif untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pengerjaan Pasar Tavip," ujar sumber.

Sumber juga menguraikan sejumlah kecurangan yang terjadi di proyek Pasar Tavip Binjai tersebut. Di antaranya, Pihak Manajemen Konstruksi (MK) untuk kesekian kalinya menyurati kontraktor PT. KBMP dengan tembusan PPK pada tanggal 21 September 2024, mengingatkan kembali supaya menyelesaikan administrasi karena waktu yang semakin mendekat

setelah masa perpanjangan waktu selama 60 hari (2 bulan) berakhir tanggal 10 November 2024.

"Jika tidak dapat diselesaikan, maka pencairan keuangan 60-70 persen tertunda," tegas pihak MK dalam suratnya yang ditandatangani Bahari Nur ST selaku TA Quantity Engineer.

Kejanggalan lainnya, dalam beberapa kali rapat tim antara pihak MK dan PPK, seperti pada Rabu (23/10/2024) lalu, terungkap bahwa pengujian tanah dan pengujian beton belum dilakukan, sehingga mutu proyek pembangunan Pasar Tavip Binjai benar-benar diragukan.

Selanjutnya, penutup atap yang terpasang bergelombang (tidak rata), pemasangan keramik bermasalah, railing borders tidak mengikuti gambar shoft drawing, kamar mandi dan kondisi air, serta kebersihan masih bermasalah.

Anehnya lagi, proyek yang diduga amburadul tersebut hingga sekarang pihak kontraktor tidak mendatangkan petugas K3. Hingga saat ini pekerja pun tidak menggunakan helm dan rompi pengaman, padahal anggaran untuk K3 pada kontrak cukup lumayan besar.

lainnya, yang mendapatkan gratifikasi seperti suap untuk mencurangi keputusan pengadilan.

Para pelaku diancam dengan laknat Allah swt. Sabda Nabi saw: "La' natu l-loohi ala r-roosiyi wa l-'urtasyii" (Laknat Allah atas pemberi suap dan penerimaanya - HR Ahmad)Khalifah Umar bin al-Khothob ra. dengan tegas melakukan audit terhadap harta para pejabatnya. Beliau juga menyita harta para pejabatnya yang dinilai berlebih dari seharusnya.

Demikian seperti yang beliau lakukan atas kelambahan harta Abu Hurairah ra --salah seorang sahabat Nabi terkemuka dan perawi ribuan hadits.

Beliau juga menyita hadiah yang didapat Abu Sufyan dari pemberian Muawiyah, anaknya yang menjadi gubernur di Syam (Lihat: Ibnu al-Jauzi, Shifat ash-Shafwah, 2/47; Ibnu Katsir, Al-Bidayah wa an-Nihayah, 7/114).

**Mustahil Tanpa Islam**

Penyebab paling mendasar dari kegagalan sistem hukum dan peradilan hari ini karena ia dibangun di atas asas sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan).

Hukumnya pun dibuat oleh manusia sesuai dengan kepentingan dan hawa nafsunya.

Dari ruang pengadilan yang hampa iman dan takwa, kecuali sebagai penghisas lisan saja, bagaimana bisa muncul rasa takut berlaku khianat dan curang?

Jika Allah swt saja sudah tidak ditakuti hingga mereka berani berbuat curang atau menyimpang, lalu siapa lagi yang mereka takut di dalam Islam, para aparat penegak hukum selalu diingatkan agar jangan pernah merasa aman dari hisab dan balasan Allah swt.

Allah swt berfirman: "Afa' aminuu makro l-loohi fa laa ya' manu makro l-loohi illa l-qoumu i-khoosiru-na" (Apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah --yang tak terduga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain kaum yang rugi (QS al-A'raf [7]: 99).

Ketakwaan itulah yang menjadikan Qodhi Syuraikh memutuskan perkara dengan adil. Karena keadilannya, seorang penguasa sekalipun, seperti Khalifah Ali bin Abi Thalib ra, kalah dalam sengketa melawan orang Yahudi di pengadilan.

Pasalnya, menurut Qadhi Syuraikh, Khalifah Ali tidak punya saksi dan bukti kuat menuduh orang Yahudi mencuri baju besi miliknya.

Demikian sebagaimana dikisahkan antara lain oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa an-Nihayah dan Ibnu Atsir dalam Al-Kaamil fi at-Tariikh.

Maka, jika kaum muslim merindukan pengadilan yang bersih dan mampu menciptakan keadilan hakiki, maka itu hanya ada pada sistem pengadilan Islam yang menerapkan hukum-hukum Allah swt di bawah naungan sistem pemerintahan Islam, yakni Khilafah. Karena itu mari terus kita gaungkan seruan pengakuan syariah Islam secara kaaffah (paripurna) dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam peradilan Islam. Dengan itu keadilan dapat tercipta dengan sesungguhnya.

Nabi saw bersabda: "Allohu ma'a l-qoodhiyyi maa lam yajur fa idzaa jaaro tajallaa 'anhu wa lamazahu sy-syaithonu" (Sungguh Allah senantiasa membersama hakim selama dia tidak menyimpang. Jika dia menyimpang maka Allah meninggalkan dirinya dan yang menemani dia adalah setan. (HR Ibnu Majah).

Kisah Ali Kalah di Pengadilan Ali bin Abi Thalib menemukan baju besinya di tangan seorang Yahudi yang menemukananya, dan Ali lalu mengetahuinya, Ali pun berkata, "Baju besiku jatuh dari untaku yang bernama Aurag (yang berwarna abu-abu)." Si Yahudi berkata, "Ini baju besiku dan ada di tangkanku". Lalu si Yahudi menantang Ali, "Kita bawa perkara ini ke hadapan seorang hakim kaum muslimin!" (Dinukil dari Bulletin Kaffah dan dari almanhaj.or.id-cp)

"Hingga saat ini pihak kontraktor seperti sengaja tidak membuat tangga inspeksi sehingga menyulitkan pihak MK melakukan checklist mutu dan administrasi. Hal ini diduga ada unsur kesengajaan dan strategi licik pihak kontraktor untuk mengakali akal pengawasan sehingga memperbesar kerugian negara,, tegas sumber.

Mengingat besarnya potensi kerugian negara, diminta supaya pihak Kejaksaa Tinggi Sumatera Utara segera melakukan pemeriksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor PT.Karya Bangun Mandiri Persada (KBMP) .

PPK Pasar Tavip Binjai BA sudah dua kali dikonfirmasi media lewat pertanyaan tertulis tanggal 9 Oktober dan tanggal 23 Oktober 2024, namun PPK nya bernama Budi Alfiyanto bungkam hingga sekarang.

"Baik PPK dan Kasatker serta pihak terkait lainnya juga perlu segera dicopot karna tidak komunikatif terhadap pers dan terkesan kurang bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat," ucap sumber yang sangat memahami seluk beluk pembangunan Pasar Tavip yang menghabiskan uang negara Rp 76 miliar lebih. (tim)

"Hingga saat ini pihak kontraktor seperti sengaja tidak membuat tangga inspeksi sehingga menyulitkan pihak MK melakukan checklist mutu dan administrasi. Hal ini diduga ada unsur kesengajaan dan strategi licik pihak kontraktor untuk mengakali akal pengawasan sehingga memperbesar kerugian negara,, tegas sumber.

Mengingat besarnya potensi kerugian negara, diminta supaya pihak Kejaksaa Tinggi Sumatera Utara segera melakukan pemeriksaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor PT.Karya Bangun Mandiri Persada (KBMP) .

PPK Pasar Tavip Binjai BA sudah dua kali dikonfirmasi media lewat pertanyaan tertulis tanggal 9 Oktober dan tanggal 23 Oktober 2024, namun PPK nya bernama Budi Alfiyanto bungkam hingga sekarang.

"Baik PPK dan Kasatker serta pihak terkait lainnya juga perlu segera dicopot karna tidak komunikatif terhadap pers dan terkesan kurang bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat," ucap sumber yang sangat memahami seluk beluk pembangunan Pasar Tavip yang menghabiskan uang negara Rp 76 miliar lebih. (tim)